

EVALUASI PENGELOLAAN BUMKAM DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI KAMPUNG DOYO BARU KABUPATEN JAYAPURA

Junno Roberto Marbase^{1*}, Nur Aedah², Vince Tebay²

¹) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Jayapura

²) Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

* Email: junnoroberto@gmail.com

Abstract :

This research aims to evaluate the management of BUMKam (Village-Owned Enterprises) in increasing the Original Income of Doyo Baru Village in Jayapura Regency, as well as analyzing the supporting and inhibiting factors. This research is important to support the economic independence of Doyo Baru Village through effective and efficient BUMKam management. This research uses a qualitative research approach with a research location in Doyo Baru Village, Waibu District, Jayapura Regency. With data collection techniques, namely interviews, observation, and documentation. data analysis includes data reduction stages, data display, and conclusion drawing and verification. The results of this study indicate that in terms of effectiveness, success lies in fulfilling the previously planned program. Efficiency, has been maximized. Adequacy, has met the needs of the village community. Equality, the community enjoys the Village-Owned Enterprise program because its management involves the village community. Responsiveness, the community has a good response because it provides satisfaction to the target group. Accuracy, has been carried out well because the program implementation system has been implemented. Supporting factors, the community and administrators motivate each other in running the program, while inhibiting factors, not all people are involved in program management.

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi Pengelolaan BUMKam (Village-Owned Enterprises) dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini penting untuk mendukung kemandirian ekonomi Kampung Doyo Baru melalui pengelolaan BUMKam yang efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura. Dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. analisis data meliputi tahapan reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi Efektivitas, keberhasilan terletak pada pemenuhan program yang telah direncanakan sebelumnya. Efisiensi, sudah secara maksimal. Kecukupan, sudah memenuhi kebutuhan masyarakat kampung. Pemerataan, masyarakat menikmati program Badan Usaha Milik Kampung karena pengelolaannya melibatkan masyarakat kampung. Responsivitas, masyarakat memiliki respon yang baik karena memberikan kepuasan kepada kelompok sasaran. Ketepatan, sudah terlaksana dengan baik dikarenakan sistem pelaksanaan program sudah terlaksana. Faktor pendukungnya masyarakat dan pengurus saling memotivasi satu sama lain dalam menjalankan program. sedangkan Faktor penghambatnya, tidak semua masyarakat terlibat dalam pengelolaan program.

Keyword: *Evaluation, Management, Village-Owned Enterprises, Doyo Baru Village, Jayapura Regency, Papua*

PENDAHULUAN

Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk pembangunan ekonomi di daerah perkampungan untuk jangka waktu yang cukup lama (Syahza & Suaman, 2014). Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang diinginkan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah memperkenalkan pendekatan baru yang berpotensi mendorong perekonomian daerah. Salah satu upaya tersebut adalah

dengan mendorong kewirausahaan melalui Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) yang dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat setempat, sebagai sarana yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di perkampungan (Wambraw & Imbiri, 2023).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, badan-badan tersebut diberikan kewenangan untuk mengawasi pemanfaatan sumber

daya lokal untuk perbaikan kondisi keuangan masyarakat. Salah satu metode pengembangan masyarakat saat ini adalah pembentukan Badan Usaha Milik Kampung, juga dikenal sebagai BUMKam (Saputra, 2022). Ini adalah lembaga atau badan ekonomi yang diakui secara hukum yang dimiliki oleh pemerintah kampung, yang beroperasi secara mandiri dan profesional dengan menggunakan modal yang berasal dari sumber daya kampung sendiri. Tujuan akhir pembentukan BUMKam adalah untuk menghasilkan keuntungan yang dapat digunakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAKam), meningkatkan perekonomian lokal, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk kampung. Selain itu, inisiatif ini diharapkan dapat memberikan lebih banyak peluang bisnis, sehingga mendorong otonomi kampung dan mengurangi pengangguran, sekaligus mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal yang tidak berkelanjutan.

BUMKAM lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi kampung berdasarkan kebutuhan dan potensi kampung. Pengelolaan BUMKAM sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat kampung, yaitu dari kampung, oleh kampung, dan untuk kampung. Cara kerja BUMKAM adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli kampung (Sawir, dkk, 2023). Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMKAM akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas kampung dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung (Lobwaer, & Awal, 2020).

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Kampung mengatur hal-hal pokok berkaitan dengan pendirian

dan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung yang harus ditindalajuti oleh pemerintah daerah maupun pemerintah kampung dalam bentuk Peraturan Bupati, Peraturan Kampung maupun produk hukum lainnya. Berlandaskan dengan Peraturan Bupati Jayapura Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2023 yang memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Kampung Tahun 2023 untuk memulihkan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam untuk mendukung pencapaian SDGs Kampung.

Pendirian BUMKam bertujuan untuk meningkatkan perekonomian kampung, mengoptimalkan aset kampung agar bermanfaat untuk kesejahteraan kampung, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi kampung, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar Kampung dan dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jalinan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan Masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi kampung dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan kampung mendapatkan pendapatan asli kampung (PAKampung) (Milia, dkk, 2023; Awal, dkk, 2020).

Dilihat dari efektifitas pelaksanaan dan pemantauan Program oleh BUMKam Kampung Doyo Baru Distrik Waibu dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Doyo Baru Distrik Waibu belum optimal, tujuannya belum tercapai, prosesnya masih lemah dan hasil pelaksanaan program belum maksimal. Dampak BUMKam belum merata dalam pembangunan belum melibatkan peran partisipasi masyarakat sepenuhnya, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Dari segi efisiensi, BUMKam Kampung Doyo Baru Distrik Waibu belum tepat sasaran, ketersediaan dan pengeluaran dana masih belum seimbang

dan mendapatkan keuntungan yang tepat, dari segi kecukupan BUMKam Kampung Doyo Baru Distrik Waibu seiring terkendala oleh transportasi dan kesiapan pelaksanaan programnya, dari segi pemerataan pemberian dan pelaksanaan pelayanan BUMKam Kampung Doyo Baru Distrik Waibu masih harus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat lebih tertarik.

Dengan demikian, Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan BUMKam Kampung Doyo Baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan menurut Dunn (2003), yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung serta faktor penghambat pengelolaan BUMKam di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memberikan jawaban dari rumusan masalah. Pendekatan deskriptif yaitu untuk memahami dan menggambarkan kejadian yang diteliti, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif (Sugiyono, 2019). Dengan metode ini penulis bisa memberikan gambaran umum mengenai Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Kampung Di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan Di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura, karena kampung ini salah satu kampung yang mendirikan BUMKam dengan bertujuan untuk mensejahterakan msyarakat kampung dan meningkatkan pendapatan asli kampung.

Instrument atau alat yang di pakai dalam pngumpulan data yaitu peneliti itu sendiri, dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta data, dan peneliti harus mendapatkan data dari narasumber yang tepat untuk mendapatkan data yang

valid. Untuk mendaptkan data tersebut peneliti akan terjun langsung ke pegawai BUMKam dan akan melakukan wawancara dengan bantuan alat perekam seperti handphone untuk merekam hasil wawancara.

Menurut Sugiono (2011:137) pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai seting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Metode pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan kunci, termasuk pengurus BUMKam, aparat kampung, dan masyarakat setempat, untuk menggali informasi mengenai pengelolaan BUMKam, termasuk tantangan dan peluangnya. Observasi dilakukan langsung di lapangan untuk memahami kondisi aktual pengelolaan BUMKam di Kampung Doyo Baru, termasuk aktivitas ekonomi yang berlangsung, partisipasi masyarakat, dan pemanfaatan aset lokal. Sementara itu, dokumentasi mencakup pengumpulan data sekunder seperti laporan keuangan, dokumen peraturan kampung, serta kebijakan terkait BUMKam, yang digunakan untuk mendukung analisis dan memberikan gambaran menyeluruh terkait pengelolaan BUMKam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAKam).

Menurut Miles & Huberman (1992) menyatakan bahwa aktivitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif dibagi menjadi 3 aktivitas antara lain reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi pengelolaan BUMKam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura

BUMDes/Kam adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah desa/kampung serta masyarakat mengelola institusi tersebut sesuai kebutuhan dan ekonomi desa. Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 Ayat 2 ialah Badan Usaha Milik Desa,

kemudian dikenal sebagai BUM Desa, merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes/Kam didirikan melalui Musyawarah Desa/Kampung atas keinginan bersama masyarakat desa/kampung, oleh karena itu ketika BUMDes/Kam hadir di desa/kampung, itu menunjukkan bahwa masyarakat desa/kampung bertanggung jawab. Pemerintah Desa/Kampung hanya sebagai perantara BUMDes/Kam tidak boleh disajikan sebagai kehendak kepentingan individu atau kelompok. Ada kolektivitas yang diwujudkan dalam kerjasama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/kampung.

Badan Usaha Milik Kampung merupakan wadah dimana pemerintah kampung bekerja sama untuk memenuhi tugas perwalian masyarakatnya dalam rangka mensejahterakan atau meningkatkan perekonomian masyarakat kampung dan menunjang pendapatan asli kampung. Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura membantu pemerintah kampung untuk melaksanakannya secara bijaksana dan memberikan makna sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kampung. Pembentukan unit-unit usaha di Badan Usaha Milik Kampung Doyo Baru didasarkan prinsip pengelolaan yang telah dibuat dalam penggalan potensi.

Pada hasil penelitian terkait Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura ini dapat diukur dengan beberapa berdasarkan teori dari Dunn (2003:610). Dari indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam sebagai hasil dari penelitian ini yang pertama: Efektivitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan. Dan di dalam setiap indikatornya akan di

lengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator efektivitas maka penulis akan menyajikannya.

Dalam melakukan evaluasi suatu program yang sudah dibentuk atau sudah berjalan maka diperlukannya kriteria untuk mengukur keberhasilan program tersebut. Evaluasi kebijakan dalam perspektif alur proses/siklus kebijakan publik, menempati posisi terakhir setelah implementasi kebijakan, sehingga sudah sewajarnya jika kebijakan publik yang telah dibuat dan dilaksanakan lalu dievaluasi (Nugroho, 2003; Winarno, 2002). Dari evaluasi akan diketahui keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kebijakan itu dapat dilanjutkan atau perlu perbaikan sebelum dilanjutkan, atau bahkan harus dihentikan. Evaluasi juga menilai keterkaitan antara teori kebijakan dengan prakteknya implementasi dalam bentuk dampak kebijakan, apakah dampak tersebut sesuai dengan yang diperkirakan atau tidak.

Dari hasil evaluasi pula kita dapat menilai apakah sebuah kebijakan/program memberikan manfaat atau tidak bagi masyarakat yang dituju. Secara normatif fungsi evaluasi sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik, terlebih di masa masyarakat yang makin kritis menilai kinerja pemerintah.

Berikut adalah pengertian evaluasi kebijakan yang diungkap oleh William N. Dunn yang diterjemahkan oleh Wibawa dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan Publik, yaitu, Evaluasi kebijakan pada prinsipnya adalah proses yang dilakukan untuk menilai sebuah kinerja kebijakan yang dihasilkan setelah kebijakan tersebut dibuat dan dilaksanakan, (Dunn 2003).

Sesuai dengan pengertian evaluasi kebijakan yang di ungkap oleh William N.

Dunn diatas, maka Dunn mengemukakan beberapa hal mengenai kriteria yang diperlukan dalam proses evaluasi kebijakan publik, yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, Ketepatan". (Dunn, 2003). Karena dalam evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura merujuk pada kerangka teori yang diutarakan oleh Dunn (2003), yang mengungkapkan bahwa Evaluasi dapat dilihat keberhasilannya dalam kriteri evaluasi diantaranya :

Efektivitas (*Effectiveness*)

Kesimpulan yang dapat diambil dari kriteria efektivitas dalam melakukan Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung adalah untuk melihat bagaimana suatu program yang dijalankan mencapai penghasilan dan dilihat dari tujuan awal yang sudah dibentuk. Sedangkan efektivitas sendiri yaitu berkenaan dengan sesuatu yang diharapkan melalui alternatif yang mencapai hasil atau melihat bagaimana tujuan yang sudah dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka peneliti dapat melihat bahwa Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sudah efektif seperti yang diharapkan karena disetiap program yang adanya penghasilan pendapatan peningkatan perekonomian kampung. Dalam pelaksanaan program Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura yang telah dibentuk dan sebagai acuan telah dibuatkan regulasi Peraturan Bupati Kabupaten Jayapura sebagai bentuk responsedasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura lahirnya regulasi tentang Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

Efisiensi (*Efficiency*)

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sudah efisien dalam mengelola biaya yang ada, dengan dana itu sudah dapat menghasilkan pendapatan asli kampung dan dapat

menunjang ekonomi kampung. Dalam hal ini sudah efisien dari pengeluaran ada mendapatkan penghasilan.

Dari pendapatan tersebut belum dikatakan efisien dalam suatu program, seharusnya keberhasilan efisien itu bisa dikatakan apabila anggaran yang dimanfaatkan sekecil kecilnya tetapi dapat memberikan keuntungan sebesar besarnya. Jika dilihat dari kondisi Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura anggaran yang dikeluarkan sebesar besarnya dan pendapatan yang dihasilkan telah memberikan keuntungan. Hal ini dikarenakan adanya sistem pengelolaan yang dilakukan dari pihak ketua Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu yang konsisten dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan dan berpartisipasi dengan pengurus yang lain dan masyarakat kampung.

Kecukupan (*Adequacy*)

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis dilihat bahwa evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura tersebut sudah efektif dan efisien. Dalam hal ini berarti sebelum membentuk suatu program itu telah betul-betul dianalisis bagaimana pencapaian kedepannya sehingga dapat memberikan keuntungan terhadap kampung itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi lapangan dapat disimpulkan bahwa dalam dua program Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura pada saat ini sudah cukup sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh lembaga, proses pengelolaan dan pemanfaatannya saja yang sangat baik. Hal tersebut dikarenakan adanya partisipasi antara pengurus Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru Distrik Waibu dengan masyarakat kampung Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura.

Pemerataan (*Equity*)

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis lihat bahwa lembaga Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru

Distrik Waibu Kabupaten Jayapura sudah memiliki pemerataan atau kesamaan dalam melakukan suatu kebijakan yang telah dibuat. Dimana setiap program yang telah dibuat itu harus adanya kerja sama dalam pengelolaannya, baik itu dari pihak pengurus Badan Usaha Milik Kampung Doyo Baru, Pemerintah Kampung maupun dari pihak masyarakat desa itu sendiri.

Dalam dua program tersebut sudah mendapatkan penghasilan yang dapat meningkatkan perekonomian kampung dan mensejahterakan masyarakat kampung, pengelolaan yang dilakukan sudah maksimal sehingga kebijakan yang telah dibuat tidak merata pada kelompok yang telah dituju. Hal ini diakibatkan adanya kerja sama yang baik antara pengurus Badan Usaha Milik Kampung Doyo Baru, Pemerintah kampung maupun dari pihak masyarakat kampung.

Responsivitas (*Responsiveness*)

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis lihat bahwa suatu kebijakan dan program yang telah dibentuk oleh Pemerintah Kampung Doyo Baru Distrik Waibu Kabupaten Jayapura tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat kampung dikarenakan adanya kerja sama antara aparatur kampung dengan masyarakat kampung itu sendiri. Sehingga kriteria yang terlibat dalam responsivitas ini dianggap berhasil jika sudah memenuhi kebutuhan yang valid bagi kelompok yang semestinya diuntungkan oleh kebijakan yang telah dibuat.

Berdasarkan hasil observasi dapat dikatakan bahwa program Badan Usaha Milik Kampung Doyo Baru dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dengan memberikan hasil terhadap pendapatan kampung dan perekonomian kampung. Hal ini diakibatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Doyo Baru yang sangat baik sehingga telah memberikan pendapatan perekonomian kampung.

Ketepatan (*Appropriateness*)

Dalam kriteria ini menjelaskan bahwa Ketepatan yaitu berkenaan dengan

hasil dan tujuan yang diinginkan berguna bagi masyarakat. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi melandasi tujuan tersebut. Kriteria ketepatan ini mempertanyakan apakah tujuan dari suatu program tersebut tepat untuk suatu masyarakat. Penilaian kriteria ini melihat bagaimana mengimplemetasikan suatu program yang telah dibentuk sebelumnya kepada masyarakat apakah memberikan nilai yang bermanfaat atau tidak.

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis lihat bahwa permasalahan yang terjadi dari suatu kebijakan diakibatkan oleh kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini dalam menetapkan suatu program atau kebijakan dapat dianalisis dengan metode yang sudah ada sehingga dapat dilakukan dan dilaksanakan sesuai sasaran yang telah ditetapkan dan dilihat terlebih dahulu apakah caranya sudah benar dan gunakan atauran yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya dengan baik.

Faktor Pendukung dan Penghambat pengelolaan BUMKam dalam meningkatkan Pendapatan Asli Kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura

Faktor Pendukung

Dari segi efektivitas terdapat permasalahan tidak tercapainya perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, diefektifitas sudah tercapainya hasil yang maksimal yang telah ditargetkan, begitupun dikriteria kecukupan sudah memberikan kepuasan terhadap kebutuhan masyarakat kampung, didalam pemeratan masyarakat desa telah semua menikmati program Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru karena dari pengurus melibatkan masyarakat kampung, sedangkan dari responsivitas telah teranalisis dengan baik karena sudah meberikan kepuasan terhadap kelompok yang telah dituju, dan dalam ketepatan sudah juga terlaksana dengan baik dikarenakan sisitem pelaksanaan program terlaksana.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis lihat bahwa dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru dapat memberikan motivasi kepada masyarakat melalui kegiatan yang di berikan pengurus Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat merupakan suatu hal atau peristiwa yang ikut menyebabkan suatu keadaan yang menghambat dalam mengaplikasikannya pada saat proses berlangsung. Pada dasarnya sikap itu selalu mengalami perubahan, bahwa manusia mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang ada di sekitar atau yang memengaruhinya.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat penulis lihat bahwa tidak semua masyarakat terlibat ini menunjukkan penghambat dalam pelaksanaan Badan Usaha Milik Kampung di Kampung Doyo Baru.

KESIMPULAN

Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) di Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan perekonomian kampung. Berdasarkan evaluasi yang menggunakan enam kriteria menurut Dunn (2003), pengelolaan BUMKam dinilai efektif karena rencana yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan. Dari segi efisiensi, hasil yang dicapai maksimal sesuai target yang ditentukan. Indikator kecukupan menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat kampung dapat terpenuhi secara memuaskan. Aspek pemerataan juga tercapai, di mana seluruh masyarakat kampung telah merasakan manfaat program BUMKam berkat partisipasi pengurus yang melibatkan semua elemen masyarakat. Selain itu, responsivitas dan

ketepatan program juga dinilai baik karena sistem pelaksanaan program berhasil memenuhi kebutuhan kelompok sasaran dengan hasil yang memuaskan.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan BUMKam di Kampung Doyo Baru. Faktor pendukung utamanya adalah sinergi antara masyarakat dan pemerintah kampung yang saling memotivasi dalam mengelola program ini. Namun, terdapat faktor penghambat, yaitu kurangnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan program BUMKam. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat secara merata demi keberlanjutan program di masa depan.

REKOMENDASI RISET

Rekomendasi dari hasil penelitian ini, *Pertama*, perlu adanya bimbingan khusus seperti dari perguruan tinggi, kecamatan, kabupaten dan dinas untuk kampung agar dapat mengelola Badan Usaha Milik Kampung dengan baik sehingga dapat memberikan penghasilan untuk kampung.

Kedua, Pemerintah Kampung Doyo Baru seharusnya turut berperan aktif dalam partisipasi masyarakat kampung terhadap program Badan Usaha Milik Kampung Doyo Baru.

Ketiga, masyarakat Kampung Doyo Baru seharusnya lebih meningkatkan kesadaran berpartisipasinya terhadap program Badan Usaha Milik Kampung untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

Keempat, dalam pelaksanaan program sebaiknya harus adanya tanggung jawab yang penuh dalam diri sendiri dan tidak melibatkan kepentingan pribadi karena lembaga Badan Usaha Milik Kampung ini merupakan sesuatu milik bersama baik itu pihak pemerintah kampung maupun masyarakat kampung bukan milik personal.

DAFTAR PUSTAKA

- Awal, M., Lobwaer, A. K. R., & Syahrudin, S. (2020). Pendampingan Persiapan Pendirian Badan Usaha Milik Kampung Sermayam Indah. *Musamus Devotion Journal*, 2(2), 34-43.

- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University: Yogyakarta.
- Lobwaer, A. K. R., & Awal, M. (2020, July). Analisis peluang badan usaha milik kampung (BUMkam). In *FORUM EKONOMI: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi* (Vol. 22, No. 2, pp. 177-184).
- Miles, M. B. & Huberman, M. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Penerbit Universitas Indonesia: Jakarta.
- Milla, M. A. P., Taryono, T., & Desweni, S. P. (2023). Peran Badan Usaha Milik Kampung (Bumkam) Dalam Mendukung Pembangunan Desa Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal of Social and Policy Issues*, 176-182.
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT Elek Media Kompotindo: Jakarta.
- Peraturan Bupati Jayapura Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Kampung.
- Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Saputra, K. (2022). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Unit Usaha Simpan Pinjam Di Badan Usaha Milik Kampung Kampung Minas Barat. *Jurnal Niara*, 14(3), 307-314.
- Sawir, M., Fatimah, S., Kala'Padang, Y., Kamaluddin, S., Susilawaty, S., Abubakar, F., ... & Anirwan, A. (2023). Sosialisasi Inovatif Pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung Dosay Distrik Sentani Barat Kabupaten Jayapura. *GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 37-46.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syahza, A., & Suarman, S. (2014). Model pengembangan daerah tertinggal dalam upaya percepatan pembangunan ekonomi pedesaan. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 18(3), 365-386.
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung.
- Wambrau, L., & Imbiri, S. (2023). Analisa Ekonomi Usaha Pengolahan Kopi BUMKAM Mandai Di Distrik Kosiwo Kabupaten Kepulauan Yapen. *Sosio Agri Papua*, 12(1), 13-24.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Media Pressindo: Yogyakarta.